



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. BADUNG



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

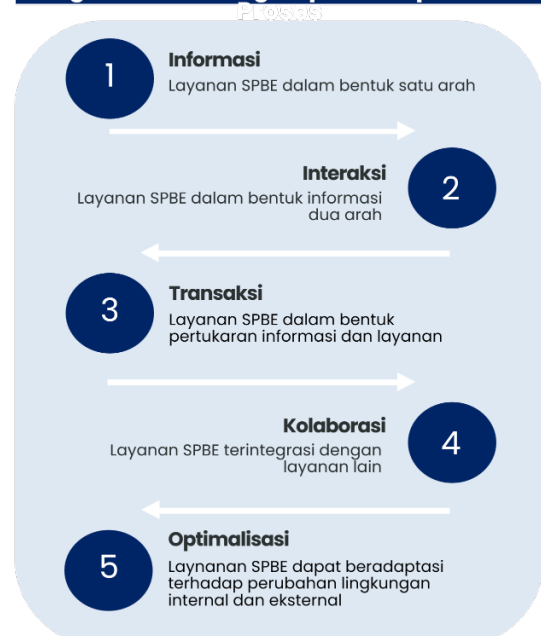
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

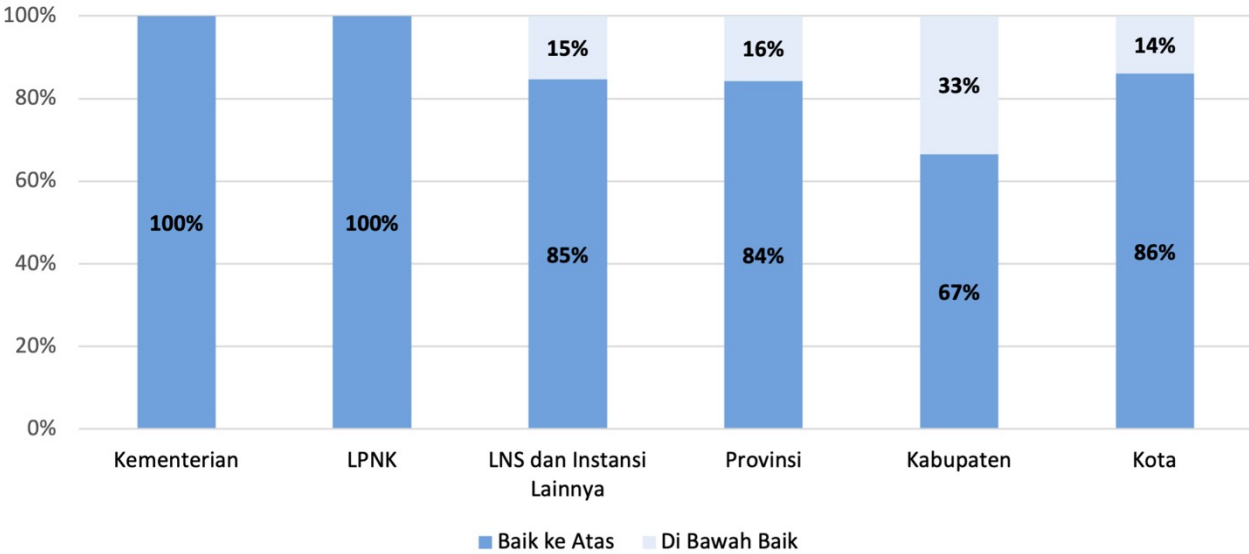
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

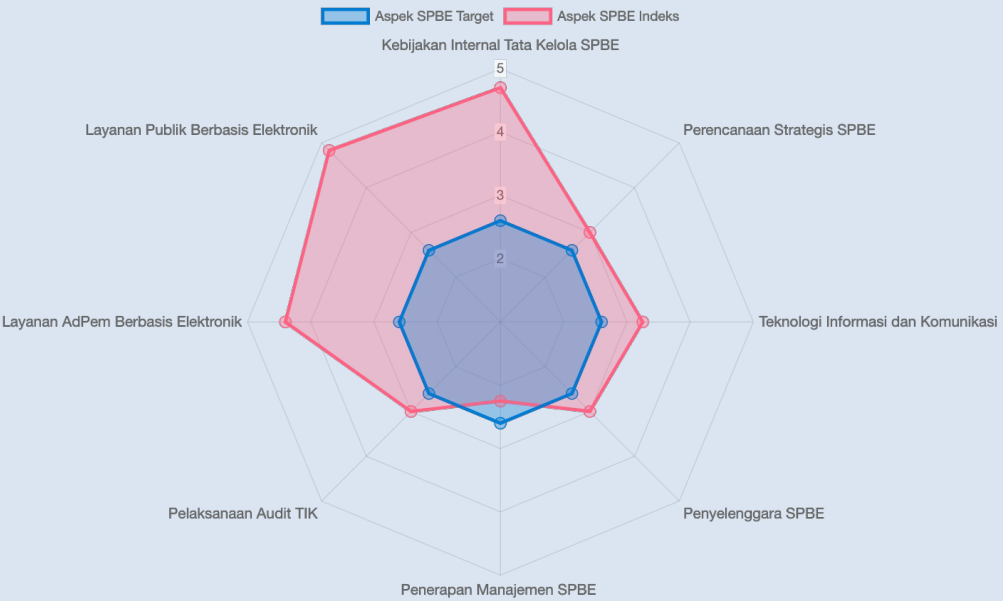
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,87
Domain Kebijakan SPBE	4,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,70
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,45
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,25
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,57
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, semua Kebijakan yang diterapkan merupakan kekuatan pada Pemkab Badung
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Badung.
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek TIK semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek TIK ini dapat terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Badung. Pembangunan Aplikasi SPBE sudah dilakukan proses reviu secara berkala, Layanan pusat data sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan sudah dilakukan reviu dan tindak lanjut secara berkala, serta Pemkab Badung sudah menggunakan sistem penghubung layanan yang terkolaborasi dengan SIPENG Nasional.
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Badung adalah adanya Tim koordinasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti yang ada pada Perbup dan sudah ada kolaborasi Penerapan SPBE dengan menggunakan konsep smart city.
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dapat terlihat yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Badung adalah adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang sudah sangat baik. Sudah ada Tim respon keamanan Cyber bekerja sama dengan BSSN. Untuk pelaporan juga sudah jelas, melalui proses reviu secara berkala dan ada tindak lanjut dari setiap proses reviu.
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, belum ada yang menjadi kekuatan pada penerapan SPBE di Pemkab Badung
- Kelemahan

Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, semua Layanan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemkab Badung.
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis elektronik semua sudah dipenuhi oleh Pemkab Badung

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, semua Layanan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemkab Badung.
- Kelemahan
Belum terlihat kelemahan yang signifikan pada Pemkab Badung

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal tata kelola, perencanaan strategis, TIK, Penyelenggara, Penerapan Manajemen, Pelaksanaan Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis elektronik mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Badung. Adapun hasil dari evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Badung, sudah dapat menggambarkan predikat memuaskan dalam penerapan SPBE sebagaimana terdapat keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Badung adalah pada Penerapan kebijakan tata kelola SPBE, semua kebijakan yang diterapkan merupakan kekuatan pada Pemkab Badung dengan tingkat kematangan mencapai level 4 dan 5. Pada Aspek TIK terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Badung. Pembangunan Aplikasi SPBE sudah dilakukan proses reviu secara berkala, adanya layanan pusat data yang sudah dilakukan secara menyeluruh dan sudah dilakukan tindak lanjut hasil reviu, dan Pemkab Badung sudah menggunakan sistem penghubung layanan yang terkolaborasi dengan SIPENG nasional. Pada aspek penyelenggara SPBE Pemkab Badung juga sudah membentuk tim koordinasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti yang terdapat pada perbup dan sudah ada kolaborasi penerapan SPBE dengan menggunakan konsep smart city. Pada Aspek Penerapan Manajemen, Pemkab Badung sudah menerapkan manajemen keamanan informasi dengan baik dibuktikan dengan adanya tim respon keamanan Cyber bekerja sama dengan BSSN. Untuk proses pelaporan juga sudah ada tindak lanjut dari hasil reviu secara berkala. Pada Layanan Administrasi Pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, pada Pemkab Badung juga sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

namun disisi lain, Pemkab Badung masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan yaitu di beberapa aspek belum terlihat proses reviu dan tindak lanjut, seperti pada aspek perencanaan strategis SPBE yang belum terlihat adanya kekuatan, dan pada aspek penerapan manajemen SPBE yang belum optimal. Selain itu juga Pelaksanaan Audit belum optimal untuk dilakukan reviu.

Apresiasi untuk Pemkab Badung dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama pada aspek tata kelola internal dan pemanfaatan teknologi informasi yang telah menunjukkan tingkat kematangan yang baik. Keberhasilan dalam pengintegrasian layanan publik berbasis digital, seperti sistem administrasi pemerintahan, menjadi contoh penerapan yang efektif dalam mendukung pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan transparan.

Saran perbaikan di masa depan Pemkab Badung diharapkan dapat memperkuat tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyusunan kebijakan internal yang lebih terintegrasi, khususnya dalam aspek interoperabilitas antar unit kerja untuk memastikan koordinasi yang efektif dan efisien. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Disarankan untuk meningkatkan kapabilitas infrastruktur TIK dengan penerapan standar keamanan data yang lebih baik, termasuk mengoptimalkan layanan pusat data melalui pengembangan SOP yang mendukung pengelolaan data secara efisien. Pada Aspek Manajemen: Pemkab Badung sebaiknya menyusun peta rencana SPBE yang mencakup prioritas strategis pengembangan SPBE, termasuk alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk memastikan keberlanjutan penerapan sistem."

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024